

Gambaran umum permasalahan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan yang diperoleh melalui telaah hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2012-2016, yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah, berkaitan dengan permasalahan terkait dengan Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta berkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan akan diuraikan pada bagian berikut.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

A. Permasalahan yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

1. Kualitas sumber daya manusia masih rendah. Hal ini tercermin dari Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Banggai Kepulauan mencapai 7,94 tahun atau rata-rata pendidikan penduduk pada jenjang kelas 2 SMP/MTs. Kenyataan ini akan mempengaruhi ketercapaian pendidikan inklusif yang tercermin dari ancaman kehilangan generasi berkualitas yang tentu akibat selanjutnya menggerogoti bonus demografi;
2. Reformasi birokrasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tercermin dari tidak adanya alur pelayanan publik pasti dan transparan baik teknis maupun besaran tarif layanan publik pada Perangkat Daerah khususnya pada layanan pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, dan sebagainya;
3. Belum optimalnya kualitas pengelolaan sumberdaya pariwisata, perikanan dan pertanian. Walaupun jumlah kunjungan wisata naik dari 61.337 orang pada Tahun 2012 menjadi 95.550 orang pada Tahun 2016, namun destinasi, promosi, kepastian wisata belum dikelola secara profesional. Produksi perikanan tangkap menurun dari 66.031 ton pada Tahun 2012 menjadi tinggal 13.252 ton pada Tahun 2016. Sebaliknya, produksi rumput laut naik dari 360.060 ton pada Tahun 2012 menjadi 656.759 ton pada Tahun 2012, namun turun

dari Tahun 2015 yakni sebesar 685.470 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya naik dari 1.126 ton pada Tahun 2012 menjadi 2.578 ton pada Tahun 2016. Di sektor pertanian, produktivitas padi sawah walaupun mengalami kenaikan dari 36,37 ton per Ha di Tahun 2012 menjadi 39,24 ton per Ha pada Tahun 2016, namun produktivitas tersebut turun dari tahun 2015 mencapai 40,23 ton per Ha;

4. Belum terpadunya pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama belum berorientasi pada perwilayahan komoditas. Perangkat Daerah masih menjalankan kegiatan secara parsial. Hal ini tercermin dari adanya Perangkat Daerah Bidang Ekonomi yang melakukan operasi pasar tanpa merujuk pada data konsentrasi kemiskinan seperti BDT TNP2K;
5. Masih rendahnya daya beli masyarakat dan tingginya baik jumlah maupun persentase angka kemiskinan. Hal ini tercermin dari tingginya angka kemiskinan mencapai 18,72 ribu jiwa atau proporsinya mencapai 16,18 persen dari total penduduk pada Tahun 2016;
6. Iklim investasi belum kondusif. Peta dan wilayah penanaman modal belum tersedia;
7. Kualitas infrastruktur dan sinergitas antar 12 kecamatan dan desa belum memadai;
8. Belum optimalnya aksesibilitas serta kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan. Hal ini tercermin dari AMH mencapai 98,96 persen, RLS mencapai 7,94 tahun dan AHH mencapai 64,44 tahun;
9. Degradasi Lingkungan Masih Berlangsung terutama di wilayah pesisir terutama pengrusakan bakau dan terumbu karang;
10. *Illegal Fishing* berupa pemboman dan pembiusan masih sering terjadi di pesisir Pulau Peling. Hal ini terlihat dari menurunnya hasil perikanan tangkap dari 66.031 ton pada Tahun 2012 menjadi 13.253 ton pada Tahun 2016.

B. Permasalahan terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Daerah yaitu Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan pemerintahan pilihan. Permasalahan di tingkat Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022. Permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Angka anak putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya masih cukup tinggi, karena masih sulitnya akses menuju fasilitas pendidikan pada beberapa wilayah (jarak yang jauh dan kondisi geografis yang kurang menguntungkan), sehingga ketersediaan fasilitas pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan masih sangat dibutuhkan (ketersediaan sekolah maupun sekolah satu atap), serta kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur perhubungan dan sarana prasarana transportasi yang memadai dan terpelihara, serta masih adanya anak putus sekolah karena tekanan ekonomi mendorong anak menjadi pekerja anak. Angka putus sekolah SD/MI mencapai 9,44 persen, angka putus sekolah SMP mencapai 26,33 persen dari jumlah penduduk usia SMP/MTs dapat menambah kehilangan generasi berkualitas yang berdampak pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan bidang pendidikan inklusif;

- b. Proses belajar-mengajar mengalami hambatan karena sarana dan prasarana penunjang pendidikan di berbagai jenjang pendidikan di beberapa wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan, rasio jumlah kelas dan siswa belum memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Terutama kondisi bangunan, ketersediaan ruang kelas baru, dan laboratorium (beserta kelengkapannya; buku, alat-alat laboratorium, jaringan internet, alat peraga pembelajaran, dan meja belajar). Rasio ketersediaan sekolah mencapai 85,10 poin, rasio guru-murid pendidikan dasar mencapai 1.155,10 poin dan rasio guru murid pendidikan menengah mencapai 1.048,92 poin;
- c. Kualitas dan kuantitas layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal, masih rendah di beberapa wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan. Di beberapa wilayah belum tersedia atau belum memadainya layanan pendidikan anak usia dini, kejar paket A/B/C, dan balai-balai pelatihan (terutama pendidikan kewirausahaan). Khusus untuk pendidikan anak usia dini, dukungan finansial pemerintah dianggap masih minim dalam penyediaan fasilitas belajar, operasional penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kualitas guru (di beberapa wilayah sangat bergantung pada pembiayaan mandiri/iuran orang tua). Dalam konteks pendidikan, terdapat juga kesenjangan antara kualifikasi guru PAUD dengan kompetensi yang harus dipenuhinya;
- d. Masih rendahnya kualitas lulusan dan terhambatnya proses belajar-mengajar, rasio guru dan siswa masih timpang. Selain itu, sebaran guru antar wilayah pada berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan masih belum merata, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, terutama di daerah-daerah terpencil. Selanjutnya, sebaran guru berdasarkan bidang kompetensi juga masih belum merata, sehingga di banyak

sekolah masih terdapat kekurangan guru pada bidang keahlian tertentu;

- e. Masih rendahnya kualitas lulusan dan terhambatnya aktivitas belajar-mengajar, karena masih rendahnya kualitas tenaga pendidik, baik dari sisi kualitas pendidikan/kemampuan, maupun dari sisi dedikasi/kemauan guru dalam menunaikan tugasnya. Kondisi ini terjadi hampir di semua wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- f. Masih rendahnya dedikasi dan motivasi tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya, antara lainnya disebabkan karena masih rendahnya kesejahteraan guru. Sebagian besar guru yang berstatus pegawai honorer dan guru daerah terpencil, masih menerima insentif yang kurang memadai. Tunjangan sertifikasi guru juga sering terhambat dalam pencairannya. Selain itu, rumah dinas guru belum memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya;
- g. Terhambatnya aktivitas pembelajaran, karena masih kurangnya tenaga kependidikan (tenaga administrasi, pustakawan, dan teknisi) di beberapa sekolah yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- h. Masih rendahnya koordinasi dan sinergitas antar *stakeholder* pendidikan, terutama pihak sekolah, Komite Sekolah, dan Pemangku Kepentingan Lainnya. Komite Sekolah hanya dilibatkan dalam persetujuan tertentu terutama berkaitan dengan usulan pembangunan fasilitas sekolah;
- i. Pengawasan terhadap proses dan kualitas belajar-mengajar yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pendidikan, masih belum optimal. Terutama karena hambatan jarak (kurangnya sarana transportasi, dan lokasi kantor yang belum dapat menjangkau semua wilayah);
- j. Besaran beasiswa pada setiap jenjang pendidikan belum sebanding dengan besarnya biaya operasional yang dibutuhkan

sesuai dengan kondisi spesifik wilayah seperti biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah terpencil lainnya. Selain itu, dalam beberapa kasus masih terdapat penerima bantuan yang seharusnya tidak lagi berhak menerima bantuan seperti anak putus sekolah masih menerima tunjangan pendidikan);

- k. Terdapat hambatan-hambatan yang berkaitan dengan kondisi siswa. Hambatan-hambatan tersebut tidak terlepas dan merupakan hasil dari kinerja pendidikan formal, seperti, masih kurangnya minat baca, dan budi pekerti siswa;

2. Kesehatan

- a. Masih belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat, karena akses menuju fasilitas kesehatan terdekat dan fasilitas kesehatan rujukan masih menjadi permasalahan di beberapa wilayah, karena jarak yang jauh dan atau kondisi geografis yang menyulitkan, sehingga dibutuhkan penambahan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pusku, poskesdes. Selain itu, untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan juga dibutuhkan ketersediaan alat transportasi (ambulans), terutama transportasi laut melayani penduduk di pesisir dan pulau yang belum terakses transportasi dasar dan ambulans laut bagi rujukan ke RSUD Luwuk;
- b. Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan di beberapa wilayah karena sarana dan prasarana penunjang kesehatan yang masih belum memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, seperti listrik, air, telekomunikasi, transportasi rujukan, biaya transportasi petugas kesehatan desa;
- c. Belum terdistribusinya secara meratanya, tenaga kesehatan (Dokter Umum, Dokter Spesialis, Perawat, Tenaga Farmasi, Tenaga Administrasi Kesehatan, Laboran dan Nutrisionist); baik dari sisi kuantitas maupun kualitas di beberapa wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan;

- d. Masih rendahnya motivasi dan dedikasi tenaga kesehatan yang berasal dari luar daerah, karena masih belum tersedia secara memadai fasilitas bagi tenaga kesehatan seperti rumah dan kendaraan dinas;
- e. Masih belum optimalnya pelayanan posyandu, dan pada beberapa wilayah terdapat posyandu yang tidak lagi aktif, karena belum adanya sinergi antar pemangku kepentingan, kurangnya sosialisasi, rendahnya kapasitas dan insentif bagi kader posyandu dan kurangnya fasilitas pendukung layanan;
- f. Masih belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat, karena Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah dalam keseharian hidup masyarakat. Terutama, kesadaran masyarakat tentang sanitasi, yang berkaitan dengan kegiatan mandi, cuci, kakus (MCK), pengelolaan sampah dan pengetahuan orang tua terhadap gizi (masih terdapat beberapa kasus gizi buruk). Hal ini disebabkan pula oleh fenomena pada kecamatan yang aktivitas hidupnya hanya mengandalkan cadangan air hujan;
- g. Masih belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakat karena keterbatasan penyediaan obat-obatan dan masih kurangnya tindakan pencegahan penyebaran penyakit;
- h. Permasalahan yang berkaitan dengan jaminan kesehatan, seperti, anggota masyarakat yang berhak menerima tunjangan, tetapi belum diusulkan, dan terdata;
- i. Alokasi anggaran APBDES di bidang kesehatan masih minim jika dibandingkan dengan anggaran infrastruktur.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Terdapat beberapa hambatan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan. Satu di antaranya adalah ketersediaan prasarana perhubungan darat yang belum memadai (baik dari sisi kualitas maupun kuantitas). Prasarana perhubungan yang dimaksud adalah jalan dan jembatan (jalan antar dusun, antar

desa, jalan ke kantong produksi dan fasilitas-fasilitas publik lainnya, plat duecker dan lain-lain). Selain ketersediaan, dibutuhkan upaya pemeliharaan yang berkelanjutan bagi infrastruktur yang telah ada. Hal ini tercermin dari panjang jalan dalam kondisi baik menurun dari 724,47 km pada Tahun 2012 menjadi tinggal 528,93 Km pada Tahun 2016;

- b. Pada beberapa wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan, pengairan persawahan, perkebunan masih belum memadai, sehingga dibutuhkan peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan saluran irigasi, terutama irigasi teknis. Irigasi yang membutuhkan pemeliharaan setiap tahun mencapai 1.337,5 meter ;

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Permasalahan di bidang perumahan yang masih ditemui di beberapa wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah belum tersedianya secara memadai fasilitas perumahan untuk masyarakat, serta ketersediaan perumahan untuk tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh, kebersihan lingkungan perumahan dan ketersediaan sanitasi yang belum memadai. Rasio Rumah Layak Huni di Tahun 2016 mencapai 0,11 poin artinya setiap 100 rumah penduduk, ada 11 unit merupakan rumah belum layak huni.

5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

- a. Terbatasnya sarana prasarana dan dukungan operasional Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan LINMAS utamanya dalam mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah;
- b. Kualitas dan Kuantitas Sumber daya manusia belum memadai utamanya di pelatihan dan bimbingan teknis kepamongprajaan;
- c. Belum optimal upaya pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal;
- d. Belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan dan

Bhineka Tunggal Ika (prinsip keberagaman) dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. Sosial

- a. Masih terdapat populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (ketelantaran, kecacatan, ketunaan, korban bencana alam, korban bencana sosial, kemiskinan, KAT) belum tertangani. PMKS tersebut meningkat dari 650 jiwa pada Tahun 2012 menjadi 4.640 jiwa pada Tahun 2016. Sedangkan anak terlantar dan perempuan rawan sosial ekonomi menurun jumlah dari masing-masing 1.600 jiwa dan 800 jiwa pada Tahun 2012 menjadi 1.202 jiwa dan 600 jiwa pada Tahun 2016;
- b. Masih kurangnya kepedulian masyarakat termasuk dunia usaha dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- c. Kurangnya lembaga masyarakat dan lembaga pemerintahan yang fokus/peduli pada masalah kerawanan sosial. Data lanjut Usia Terlantar dan Anak dengan Kedisabilitas menunjukkan adanya kenaikan dari masing-masing 1.454 jiwa dan 32 jiwa pada Tahun 2012 menjadi 1.531 jiwa dan 38 jiwa pada Tahun 2016;
- d. Belum terintegrasinya sistem sosial yang berwawasan gender dalam program pemberdayaan dan kesejahteraan sosial.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Masih minimnya sarana dan prasarana bidang ketenagakerjaan;
- b. Belum adanya pengelolaan Balai Latihan Kerja;
- c. Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja ;
- d. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan belum optimal;
- e. Belum maksimalnya tatakelola bidang ketenagakerjaan;

f. Perlu Peningkatan pelaporan tenaga kerja asing secara berkala.

2. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak

- a. Masih rendahnya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
- b. Masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Masih rendahnya promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok masyarakat.

3. Pangan

- a. Permintaan pangan khususnya beras meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk sehingga harus dipasok dari luar Banggai Kepulauan;
- b. Masih rendah animo masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal selain beras;
- c. Masih lemahnya kapasitas pengelolaan kelembagaan lumbung pangan;
- d. Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha dan pelaku utama bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- e. Masih rendahnya produksi komoditas unggulan daerah yang bersumber dari pangan lokal.

4. Pertanahan

- a. Harapan atas tingginya harga tanah yang ditetapkan secara sepihak oleh pemilik dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) menimbulkan ketidakpuasan pemilik;
- b. Adanya kesulitan mengurus sertifikat tanah;
- c. Adanya tumpang tindih kepemilikan lahan;
- d. Pengelolaan dan pemanfaatan Lahan yang belum optimal ;
- e. Sulitnya mendapatkan lahan strategis untuk kepentingan umum.

5. Lingkungan Hidup

- a. Belum maksimal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- b. Masih rendahnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
- c. Masih rendahnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- d. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat lokal/adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Masih rendahnya sarana dan prasarana persampahan;
- f. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan sampah.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan belum memadai;
- b. Kurang SDM aparatur dalam pengelolaan SIAK;
- c. Kurangnya pemahaman aparat desa tentang pentingnya data base kependudukan;
- d. Tingkat pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Proporsi penduduk yang memiliki KTP mencapai 78,81 persen dari total penduduk, bayi berakte kelahiran mencapai 66,99 persen dari total bayi, serta rasio pasangan berakte nikah hanya mencapai 14,09 persen. Fenomena ini akan mempengaruhi justifikasi yuridis individu dalam kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Masih rendahnya kualitas aparatur Pemerintah Desa;
- b. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- c. Masih lemahnya keberdayaan masyarakat perdesaan;
- d. Belum optimalnya lembaga ekonomi perdesaan.

8. Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana

- a. Belum maksimalnya penyuluhan dan pelayanan program keluarga berencana;
- b. Masih rendahnya peran masyarakat dalam mendukung program keluarga berencana.

9. Perhubungan

- a. Masih minimnya sarana dan prasarana bidang perhubungan;

- b. Belum maksimalnya tatakelola bidang perhubungan;
- c. Rendahnya partisipasi masyarakat bidang perhubungan;
- d. Terbatasnya moda transportasi darat dan laut ;
- e. Masih kurangnya minat investor menanamkan modalnya di bidang transportasi. Jumlah arus penumpang meningkat dari 4.620 orang pada Tahun 2012 menjadi 52.510 pada Tahun 2016. Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan mencapai 0,07 poin artinya setiap 100 km jalan hanya dilalui oleh 7 kendaraan.

10. Komunikasi dan Informatika

- a. Masih lemahnya kelembagaan bidang komunikasi dan informatika;
- b. Belum tersedianya master plan pembangunan BTS (*cell plan*);
- c. Belum optimalnya jaringan internet murah bagi masyarakat umum.
- d. Terbatasnya alokasi anggaran pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika yang terkait dengan kewenangan BUMN;
- e. Belum terjangkauunya semua wilayah dengan jaringan telekomunikasi dan informatika.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan menengah

- a. Kelembagaan organisasi koperasi belum sepenuhnya berfungsi dengan baik;
- b. Manajemen dalam koperasi masih lemah;
- c. Sistem pengawasan terhadap koperasi masih lemah;
- d. Modal Kerja dan Fasilitas Usaha Koperasi dan UMKM masih terbatas;
- e. Pengembangan ekonomi usaha kecil dan menengah masih belum optimal;
- f. Diversifikasi Usaha Koperasi dan UMKM masih sangat terbatas dan belum mampu bersaing dengan Pelaku Ekonomi lainnya;
- g. Masih rendahnya kepercayaan Lembaga Keuangan terhadap Koperasi dan UMKM;
- h. Masih rendahnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM;

- i. Sarana dan Prasarana Pendukung Koperasi dan UMKM belum memadai. Koperasi aktif di Tahun 2016 mencapai 78,13 persen meningkat dari 71,43 persen di Tahun 2012. Jumlah UMK meningkat dari 1.162 unit di Tahun 2012 menjadi 2.036 unit di Tahun 2016.

12. Penanaman Modal

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang investasi di daerah;
- b. Kurangnya Regulasi yang memihak pada para pelaku bisnis dan kepentingan daerah yang lebih spesifik;
- c. Kemampuan pelaku dunia usaha belum sepenuhnya mampu memanfaatkan peluang usaha sesuai dengan potensi dan prospektif sumberdaya alam yang tersedia;
- d. Masih kurangnya kualitas perencanaan aparatur bidang penanaman modal;
- e. Kurangnya akses informasi bagi promosi potensi daerah.

13. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Masih rendahnya pengembangan keserasian kebijakan pemuda dan olahraga;
- b. Masih rendahnya peran serta kepemudaan;
- c. Masih rendahnya upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.

14. Statistik

- a. Data Sektoral dari Perangkat Daerah ada yang belum tersedia. Jika sudah tersedia, datanya kurang konsisten dan belum logis;
- b. Penetapan data tunggal belum optimal.

15. Persandian

- a. Belum optimal kapasitas sumber daya manusia bidang persandian;
- b. Belum optimalnya data pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi.

16. Kebudayaan

- a. Lunturnya nilai-nilai kebudayaan daerah karena derasnya kebudayaan dari luar akibat peningkatan teknologi informasi;
- b. Rendahnya apresiasi warga masyarakat dalam mengangkat nilai-nilai kebudayaan daerah;
- c. Kurangnya informasi tentang kebudayaan daerah;
- d. Lemahnya pendokumentasian sejarah kebudayaan termasuk pelestarian berbagai peninggalan sejarah Kabupaten Banggai Kepulauan.

17. Perpustakaan

- a. Sarana dan prasarana bidang perpustakaan masih terbatas;
- b. Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pengelola Perpustakaan;
- c. Belum tersedianya tenaga fungsional perpustakaan;
- d. Masih rendahnya kesadaran Perangkat Daerah menatakelola dokumen yang bernilai strategis dari sisi hukum dan nilai historis;
- e. Masih minimnya Koleksi judul buku/disiplin ilmu.

18. Kearsipan

- a. Sarana dan prasarana kearsipan masih terbatas;
- b. Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola kearsipan;
- c. Belum tersedianya tenaga fungsional kearsipan.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Perikanan

- a. Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang masih didominasi usaha penangkapan sehingga perlu diimbangi secara maksimal dengan peningkatan usaha budidaya;
- b. Pembagian zona bagi kawasan budidaya serta zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum jelas;

- c. Produk perikanan yang dihasilkan baik oleh nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan masih di bawah standar mutu yang dipersyaratkan;
- d. Teknologi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan masih sederhana sehingga perlu dikembangkan guna peningkatan produksi perikanan;
- e. Dukungan anggaran yang minim dalam upaya pemberdayaan masyarakat di pesisir serta kegiatan pendampingan dan pembinaan kelompok nelayan, pembudidaya, dan kelompok pengolah hasil perikanan serta masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. Terbatasnya dukungan permodalan perbankan bagi kelompok pemanfaat sumberdaya kelautan dan perikanan;
- g. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui usaha perikanan tangkap, usaha budidaya dan hasil olahan seperti PPI/TPI, BBIP, dan mesin pengolah hasil perikanan;
- h. Masih terdapatnya kegiatan *illegal fishing* yang mengakibatkan kerusakan ekosistem terumbu karang dan *mangrove* dan berdampak pada produksi hasil tangkapan nelayan;
- i. Minimnya infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- j. Ketersediaan data statistik perikanan yang belum akurat dalam penyajian informasi potensi dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

2. Pariwisata

- a. Pelayanan industri pariwisata masih relatif rendah;
- b. Kesadaran wisata masyarakat masih relatif kurang;
- c. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih terbatas;
- d. Masih lemahnya konsep pembangunan wisata berwawasan ekologi dan inovatif di lingkungan parawisata;
- e. Desain Kampanye wisata masih belum optimal;

- f. Peran aktif masyarakat lokal dalam pengembangan wisata masih kurang;
- g. Promosi Pariwisata belum optimal baik melalui *website terupdate* maupun media promosi tercetak reguler.

3. Pertanian

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan pangan sejalan dengan penambahan penduduk;
- b. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani;
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung bidang pertanian;
- d. Belum maksimalnya sistem pemasaran hasil pertanian;
- e. Masih rendahnya produksi dan produktifitas pertanian;
- f. Belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan;
- g. Hasil pemasaran pertanian yang diterima oleh petani relatif rendah.

4. Perdagangan

- a. Pemasaran hasil-hasil Industri belum maksimal karena rendahnya mutu dan kualitas serta harga yang belum mampu bersaing;
- b. Para Pedagang kaki lima belum berperan secara maksimal dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah karena keterbatasan keterampilan, pengetahuan serta modal, sedang fasilitas kredit yang disediakan oleh bank belum mampu dimanfaatkan secara optimal;
- c. Sarana dan prasarana distribusi barang/jasa belum memadai seperti Pasar/Gudang dan alat UTTP serta sarana pendukung usaha perdagangan lainnya;
- d. Belum tersedianya database sarana dan prasarana perdagangan, komoditi unggulan dan pengusaha formal dan non formal;
- e. Masih kurangnya informasi pasar yang diterima secara cepat dan kontinyu;

- f. Sarana dan prasarana pendukung jaminan perlindungan konsumen belum memadai;
- g. Belum meratanya pasar desa di setiap desa sebagai pusat Bergeraknya ekonomi lokal;
- h. Belum terkendalinya harga komoditi unggulan daerah seperti kelapa, coklat, dan cengkeh.

5. Perindustrian

- a. Kualitas SDM industri relatif masih rendah, khususnya pengrajin industri kecil sehingga kurang tanggap terhadap perubahan yang datang dari luar seperti teknis produksi, desain, dan kebutuhan pasar;
- b. Kemampuan manajemen dan semangat kewiraswastawan pengusaha/ pengrajin relatif masih kurang;
- c. Pemasaran hasil industri masih bersifat lokal;
- d. Peralatan dan cara kerja masih sederhana, sehingga kualitas produksi yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan;
- e. Kontinuitas bahan baku penunjang industri kecil yang berpengaruh terhadap harga jual produk;
- f. Kawasan industri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan untuk menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Transmigrasi

- a. Penyediaan Sarana dan prasarana sosial dan ekonomi di kawasan Transmigrasi belum memadai;
- b. Masih rendah kapasitas aparatur dan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi.

Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan proses penyusunan RPJMD dilakukan secara teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, maka wujud partisipatif ini diimplementasikan dalam bentuk diskusi kelompok

terarah (FGD) 12 kecamatan di ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

Identifikasi permasalahan utama pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan (Bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan permasalahan lainnya). Adapun permasalahan-permasalahan tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.1
Permasalahan Pembangunan

Kec.	Permasalahan Pendidikan	Permasalahan Kesehatan	Permasalahan Ekonomi	Permasalahan Infrastruktur
Tinangkung	PNS Tenaga pendidik masih kurang	Belum ada poskesdes/ posyandu	Petani dan nelayan belum diberdayakan secara maksimal	Belum tersedia sarana air bersih yang layak
Tinangkung Utara	belum ada ops dan insentif BKBN / PAUD	kurangnya masyarakat yang memiliki BPJS/ KIS	Belum ada tambak udang dan kepiting	masih kurang pembangunan tanggul pantai (abrasi Pantai) dan normalisasi sungai
Tinangkung Selatan	Pembangunan perpustakaan desa/sekolah belum merata	tenaga medis masih kurang (dokter gigi, analis Gizi)	masih banyak penduduk miskin	jalan kantong produksi belum memadai
	kurangnya sarana dan prasarana pendidikan (belum SPM)	Belum ada Ambulance dan Puskesmas keliling di PUSKESMAS	Obyek wisata belum terkelola maksimal	penataan ibu kota kecamatan dan desa (Tinut, Tinsel)
	Beasiswa prestasi bagi siswa miskin	perlu peningkatan status puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap	pembangunan lumbung pangan	Pembangunan rumah layak huni
		Rehabilitas Sosial (Disabilitas)	pembangunan kantor bumdes	Akses internet desa
	Sosialisasi narkoba	Pembangunan pabrik Es/Kustoring	peningkatan jalan lingkungan (antardesa)	

Kec.	Permasalahan Pendidikan	Permasalahan Kesehatan	Permasalahan Ekonomi	Permasalahan Infrastruktur	
				Pembangunan rumah adat dan sanggar seni	
				Penyusunan RTRW kecamatan dan desa	
				Penambahan jaringan irigasi (Tanut- Tinsel)	
				Perlindungan mata air di 3 kecamatan	
				Pembangunan / penambahan jaringan listrik	
				Pembangunan sarana olahraga	
Totikum	Banyaknya angka anak putus sekolah	Tingginya angka kelahiran	Hasil olahan masyarakat sulit untuk dipasarkan	Pengaspalan dalam desa Salangano - Sampaka	
		Rehab pustu Salangano dan Lopito		peningkatan jalan antar desa salangano - palam	
Totikum Selatan	terbatasnya SDM pengajar	fasulitas sarana prasarana kesehatan	hasil perikanan dikuasai oleh tengkulak/rentenir	Pembangunan jalan alternatif	
	Terlalu banyak tenaga honorer	kurangnya tenaga medis PNS	Hasil pertanian belum memberikan hasil/manfaat	Jalan antar desa tobungku-Lobuton rusak	
	Jarak tempuh sekolah jauh	masih tingginya penyakit TBC dan malaria		Penerangan Lampu Jalan	
		Pengembangan KM Totikum Selatan			Normalisasi Sungai Salangano
					Pembangunan wisata tendetung
			Pengembangan Pemukiman Kalumbatan		

Kec.	Permasalahan Pendidikan	Permasalahan Kesehatan	Permasalahan Ekonomi	Permasalahan Infrastruktur
				Internet dan telekomunikasi Pengembangan lapangan olahraga Sekolah rusak berat Pembuatan Riol Desa Alat informasi/komunikasi (tower)
Bulagi	belum ada Gedung sekolah SMA/SMK	masih kurangnya gedung dan fasilitas pustu/poskes des/posyandu	Kurangnya sarana prasarana pariwisata	Jaringan dan pelayanan air bersih yang masih sangat minim
Bulagi Selatan	Bantuan pendidikan bagi siswa miskin	Masih kurang BPJS untuk masyarakat miskin	Harga Rumput Laut rendah	Pelayanan Listrik (PLN) masih minim
Bulagi Utara	Penambahan Gedung yg belum ada (Belum ada Gedung kantor SD)	Saat ini pelayanan kesehatan hanya untuk rawat jalan, perlu pelayanan kesehatan ke rawat inap	Banyak pengangguran usia kerja	Masih rendah kualitas dan ruas jalan dan jembatan yang baik (Jalan sensit, jalan lingkungan , jalan kantong produksi)
	Belum ada gedung Satap SMO	Kurangnya Jamban bagi keluarga	produksi pertanian dan perkebunan menurun karena kurang tenaga penyuluh dan masalah hama dan pupuk	Belum ada jaringan komunikasi, informasi dan internet)
	Kekurangan guru (Guru kelas dan guru bidang studi) PNS	Kurangnya tenaga medis (dokter umum, spesialis dll)	Kurangnya bagang apung	Kebutuhan akan bronjong

Kec.	Permasalahan Pendidikan	Permasalahan Kesehatan	Permasalahan Ekonomi	Permasalahan Infrastruktur
	Jarak rumah-sekolah yang jauh (Butuh Bis sekolah)		Kurangnya nelayan yang memiliki alat tangkap	Kebutuhan Tambatan perahu
	Tidak adanya rumah dinas guru		Sulit berwirausaha	Adanya Abrasi pantai sehingga butuh talut dan tanggul
			Masalah distribusi bahan bakar minyak	Masalah banjir akibat tidak ada drainase
			Pemberdayaan perempuan masih minim	
Buko	Kurang tenaga pendidik yang PNS	Kurangnya tenaga kesehatan	Harga jual Pala sangat rendah	Pembangunan jalan kantong produksi pembangunan kantor camat buko
Buko Selatan	Kurang fasilitas di sekolah	Kurangnya tersedia obat-obat yang dibutuhkan masyarakat	Sulitnya pemasaran hasil pertanian	Rehab jalan
	Kurangnya Diklat untuk tenaga pendidik	Belum beroperasi R.S Pratama	perlu bantuan bagi nelayan	normalisasi sungai
	masih ada masyarakat yang tidak mampu membiayai kebutuhan sekolah	Kurang tenaga dokter PNS	perlu bantuan bibit ternak sapi	bantuan rumah layak huni dan rumah khusus
	rendahnya mutu pendidikan	Kurang fasilitas Ambulance	butuh ketersediaan lapangan kerja	belum ada akses telekomunikasi dan internet
	jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu	kurangnya tenaga penyuluh pertanian		

Kec.	Permasalahan Pendidikan	Permasalahan Kesehatan	Permasalahan Ekonomi	Permasalahan Infrastruktur
		Meningkatnya kematian ibu hamil / melahirkan	kurangnya ketersediaan pupuk	Perlindungan mata air
			butuh bantuan bibit pala	tidak adanya dana pembebasan lahan
			Minim sarana prasarana pasar	Belum ada pelabuhan penyeberangan (kapal ferry) dan dermaga perintis
			Tidak ada Bank di kecamatan	belum memadai sarana dan prasarana fasilitas umum
			Penyuluhan pertanian kacang mente	tidak ada akses listrik
			perlu tempat pelelangan ikan	
			penguatan SDM petani dan nelayan	
LIANG	Perhatian pemerintah dan keluarga bagi siswa;	Tingginya penderita penyakit malaria	Produksi tanaman perkebunan mengalami penurunan (Meliputi: Tanaman Cengkeh, Cokelat, Mente);	Tambatan perahu tidak tersedia/ rusak
PELING TENGAH	Pendidikan non formal digalakkan;	Air tidak layak konsumsi	Produksi tanaman pertanian/palawija (Meliputi: Kacang Tanah, Jagung)	Jalan kantong produksi tidak memadai
	Peningkatan kesejahteraan guru honorer;		Harga komoditi perkebunan dan pertanian/palawija tidak stabil	Abrasi pantai
	Penambahan tenaga guru;			

Kec.	Permasalahan Pendidikan	Permasalahan Kesehatan	Permasalahan Ekonomi	Permasalahan Infrastruktur
	Beasiswa bagi siswa miskin;		<p>Belum jelas/tidak optimalnya peranan kelembagaan ekonomi (Koperasi) bagi masyarakat (khususnya petani dan nelayan)</p> <p>Randahnya kualitas SDM Petani dan Nelayan</p> <p>Minimnya pengelolaan hasil tangkapan ikan teri pada musim hujan</p> <p>Budidaya perikanan laut belum berkembang</p>	Penyampaian informasi segala bidang antar penduduk/pemerintah desa dan kecamatan sangat lambat
			<p>Peternakan besar tidak terurus</p> <p>Budidaya peternakan besar masih terbatas</p>	

Sumber : Hasil diskusi kelompok terarah pada tanggal 16-20 Oktober 2017, permasalahan utama pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tabel 4.2
Permasalahan Lainnya

Permasalahan Lainnya		
Sosial dan lingkungan	SDM dan Kelembagaan	Seni dan Adat budaya
Banyaknya jumlah lansia yang butuh tunjangan kebutuhan hidup	minimnya kualitas SDM dan kelembagaan perangkat desa	Menurunnya pelestarian seni dan adat budaya
Lahan semakin sedikit, jumlah penduduk bertambah	belum ada peta digital desa	
Daerah rawan bencana yang masyarakatnya perlu direlokasi	terhambatnya pemekaran kecamatan dan desa	
Kurangnya tenaga keamanan di desa (TNI - Polri)		
pelestarian wilayah sekitar sumber mata air		

Sumber : Hasil diskusi kelompok terarah pada tanggal 16-20 Oktober 2017, permasalahan utama pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

4.2. ISU STRATEGIS

4.2.1 Isu Strategis Internasional

Dinamika Perekonomian Global menjadi topik pertama saat ini terutama didorong oleh sentimen pasar sebagai dampak dari Pemerintahan Donald Trump yang konsisten untuk tidak konsisten. Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan satu dari beberapa indikator kinerja visi pemerintahan berkuasa selain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, disparitas antar daerah. Sebagai negara terbuka, ekonomi Indonesia tidak terlepas dari gejolak ekonomi dunia yang berlangsung sangat cepat sejak runtuhnya sistem Bretton Woods di Tahun 1973. Ada baiknya kita menunjukkan indikator tingkat pertumbuhan ekonomi dunia selama Triwulan III 2015 dan Triwulan III

2016. Data menunjukkan bahwa selama periode kedua triwulan tersebut perekonomian dunia masih dipengaruhi oleh berbagai risiko global yang membuat lesu perekonomian berbagai belahan dunia. Laju pertumbuhan ekonomi Amerika turun dari 2,2 persen pada triwulan III 2015 menjadi 1,5 persen pada triwulan III 2016. Laju pertumbuhan ekonomi Argentina juga turun dari 2,7 persen pada triwulan III 2015 menjadi tinggal 2,0 persen pada triwulan III 2016. Laju pertumbuhan ekonomi Uni Eropa turun juga dari 2,0 persen pada triwulan III 2015 menjadi 1,6 persen pada Triwulan III 2016. Sebaliknya, negara-negara yang laju pertumbuhannya ekonomi naik pada periode tersebut adalah Filipina dan Indonesia yang tumbuh dari masing-masing 6,2 persen dan 4,7 persen pada triwulan III 2015 menjadi 7,1 persen dan 5,0 persen pada Triwulan III 2016. Sementara ekonomi Brazil mengalami pemulihan dari kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -4,5 persen pada Triwulan III 2015 menjadi 1,6 persen pada Triwulan III 2016. Lesunya perekonomian dunia disebabkan oleh lambatnya pemulihan perekonomian di negara-negara maju membuat permintaan atas produk-produk Indonesia juga melambat. Selain penyebab di atas, meningkatnya proteksionisme di negara-negara maju utamanya pasca kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika serta melambatnya perekonomian negara-negara berkembang sebagai konsekuensi turunnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dari 6,9 persen pada Triwulan III 2015 menjadi 6,7 persen pada Triwulan III 2016. Penyebab lain adalah adanya peningkatan volatilitas kurs di pasar keuangan global. Fenomena ini tentu akan menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen pada Tahun 2018. Bloomberg memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2017 dan 2018 mencapai masing-masing 5,3 persen dan 5,6 persen. IMF memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai masing-masing 5,3 persen dan 5,5 persen pada Tahun 2017 dan Tahun 2018.

Selama Triwulan III 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia *year on year* mencapai 5,02 persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ini

didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sekitar 5,0 persen pada Triwulan I 2016, 5,1 persen pada Triwulan II 2016, dan 5 persen pada Triwulan III 2016. Pertumbuhan ekonomi ini juga didorong oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencapai 5,6 persen pada Triwulan I 2016, 5,1 persen pada Triwulan II 2016, serta 4,1 persen pada Triwulan III 2016. Pertumbuhan ekonomi oleh konsumsi merupakan hal lumrah karena struktur penduduk Indonesia yang besar. Besarnya *domestic demand* akan mendorong atraktivitas produsen barang-barang konsumsi. Biasanya pertumbuhan yang didorong oleh konsumsi merupakan pertumbuhan tak berkualitas. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang didorong pembentukan modal tetap bruto (PMTB) plus perubahan inventori merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Sebaliknya, konsumsi pemerintah, ekspor dan impor belum dapat dijadikan pendorong pertumbuhan ekonomi karena mengalami kontraksi. Setelah mengalami pertumbuhan *trend* positif sebesar 3,5 persen pada triwulan I 2016 dan 6,2 persen pada Triwulan II 2016, pada Triwulan III mengalami kontraksi sebesar -3,0 persen. Sedangkan ekspor mengalami kontraksi terus selama tiga triwulan 2016 yakni -3,5 persen pada Triwulan I 2016, -2,4 persen pada Triwulan II 2016 serta -6,0 persen pada Triwulan III 2016. Demikian pula impor mengalami kontraksi yakni -5,0 persen pada Triwulan I 2016, -2,9 persen pada Triwulan II 2016 serta -3,9 persen pada Triwulan III 2016.

Dari sisi produksi, selama Triwulan I-III 2016, sektor jasa keuangan dan asuransi yang mencapai 10,5 persen dan sektor informasi dan komunikasi mempunyai laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni mencapai 9,0 persen. Sektor industri pengolahan tumbuh stabil 4,6 persen selama tiga triwulan tersebut yang didukung oleh peningkatan investasi dan insentif paket kebijakan yang diluncurkan oleh Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalan yang mengalami kontraksi selama enam triwulan, mulai Triwulan III 2016 mengalami pertumbuhan positif yang didukung oleh

peningkatan produksi migas. Bila hal ini berjalan seperti ini, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada Tahun 2018 yakni 6,1 persen bukan tidak mungkin dapat dicapai walaupun kelihatannya terlalu optimis di tengah dinamika perekonomian global yang cenderung melambat.

Perubahan Iklim dan Pemanasan Global. Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh makhluk di dalamnya, sehingga perlu langkah terpadu dalam penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan. Terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global tersebut terjadi akibat menipisnya lapisan ozon (O_3) merupakan konsekuensi pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya, penggunaan *hairspray*, pengharum ruangan. Pemanasan global menimbulkan pencairan es di artic (kutub utara) yang menimbulkan kenaikan pada permukaan air laut. Akibatnya terjadi perubahan musim, el-nino, la nina, anomali cuaca menimbulkan perubahan dan kacaunya iklim yang selanjutnya berpengaruh pada musim tanam petani, kacaunya ekosistem biota laut, intensitas bencana, dan lain-lain.

Sejak Tahun 2010, Krisis Pangan menglobal. Dunia mengalami krisis pangan sebagai konsekuensi dari anomali cuaca dan penguasaan aset pangan hanya pada negara tertentu. Setiap hari, ada 1,7 milyar penduduk dunia yang tidak memperoleh nutrisi yang layak terutama penduduk yang berdomisili di Afrika Sub Sahara dan India. Hal ini diperparah lagi oleh dominasi kartel dalam penentuan harga pangan membuat volatilitas harga pangan dunia sulit diantisipasi oleh berbagai negara. Thailand, sejak beberapa dekade telah menjadi pemegang seperempat pasokan beras terbesar di dunia. Sementara Indonesia sejak pertengahan dekade 1980an menjadi importir bahan pangan. Hampir semua kendali harga pangan ini dilakukan di Jenewa, Swiss, negara yang

tidak mempunyai kultur pangan kecuali produsen susu. Krisis pangan dunia akan menyulitkan negara-negara berpenduduk banyak sehingga harus dapat diantisipasi sebelum. Ikan dapat menjadi alternatif terbaik karena protein yang dikandungnya sangat tinggi, apalagi ikan merupakan nutrisi kecerdasan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi isu selanjutnya yang dibahas pasca berakhirnya Tujuan Pembangunan Milenium. *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh berbagai negara dan lintas pemerintahan pada resolusi PBB pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tiga tujuan mulia SDGs yakni pertama, diharapkan mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara di dunia ini. Kedua, SDGs bertujuan mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian berkelanjutan. Ketiga, target SDGs adalah menjamin adanya kehidupan sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia ini pada semua usia. Oleh karena itu, pencapaian SDGs diperlukan koordinasi, kerjasama, serta komitmen dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam tujuan pembangunan millennium (MDGs).

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Kinerja perekonomian nasional dan daerah menjadi isu pertama dalam pemerintahan sedang berjalan. Dalam membahas pertumbuhan ekonomi Indonesia, ada baiknya kita menunjukkan data tingkat pertumbuhan ekonomi dunia selama Triwulan III 2015 dan Triwulan III 2016. Data menunjukkan bahwa selama periode kedua triwulan tersebut perekonomian dunia masih dipengaruhi oleh berbagai risiko global yang membuat lesu perekonomian berbagai belahan dunia. Laju pertumbuhan

ekonomi Amerika turun dari 2,2 persen pada triwulan III 2015 menjadi 1,5 persen pada triwulan III 2016. Laju pertumbuhan ekonomi Argentina juga turun dari 2,7 persen pada triwulan III 2015 menjadi tinggal 2,0 persen pada triwulan III 2016. Laju pertumbuhan ekonomi Uni Eropa turun juga dari 2,0 persen pada triwulan III 2015 menjadi 1,6 persen pada tiwulan III 2016. Sebaliknya, negara-negara yang laju pertumbuhannya ekonomi naik pada periode tersebut adalah Filipina dan Indonesia yang tumbuh dari masing-masing 6,2 persen dan 4,7 persen pada triwulan III 2015 menjadi 7,1 persen dan 5,0 persen pada triwulan III 2016. Sementara ekonomi Brazil mengalami pemulihan dari pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar -4,5 persen pada triwulan III 2015 menjadi 1,6 persen pada triwulan III 2016. Lesunya perekonomian dunia disebabkan oleh lambatnya pemulihan perekonomian di Negara-Negara Maju yang membuat permintaan atas produk-produk Indonesia juga melambat. Selain penyebab tadi, meningkatnya proteksionisme di negara-Negara Maju utamanya pasca kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika serta melambatnya perekonomian Negara-Negara Berkembang sebagai konsekuensi turunnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dari 6,9 persen pada triwulan III 2015 menjadi 6,7 persen pada triwulan III 2016. Penyebab lain adalah adanya peningkatan volatilitas kurs di pasar keuangan global. Fenomena ini tentu akan menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen pada Tahun 2018. Bloomberg memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2017 dan 2018 mencapai masing-masing 5,3 persen dan 5,6 persen. IMF memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai masing-masing 5,3 persen dan 5,5 persen pada Tahun 2017 dan Tahun 2018.

Selama triwulan III 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia *year on year* mencapai 5,02 persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sekitar 5,0 persen pada triwulan I 2016, 5,1 persen pada triwulan II 2016, dan 5 persen pada triwulan III 2016. Pertumbuhan ekonomi ini juga didorong oleh

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencapai 5,6 persen pada triwulan I 2016, 5,1 persen pada triwulan II 2016, serta 4,1 persen pada triwulan III 2016. Pertumbuhan ekonomi oleh konsumsi merupakan hal lumrah karena struktur penduduk Indonesia yang besar. Karena *domestic demand* besar akan mendorong atraktivitas produsen barang-barang konsumsi. Biasanya pertumbuhan yang didorong oleh konsumsi merupakan pertumbuhan tak berkualitas. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang didorong pembentukan modal tetap bruto (PMTB) plus perubahan inventori merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Sebaliknya, konsumsi pemerintah, ekspor dan impor belum dapat dijadikan pendorong pertumbuhan ekonomi karena mengalami kontraksi. Setelah mengalami pertumbuhan *trend* positif sebesar 3,5 persen pada triwulan I 2016 dan 6,2 persen pada triwulan II 2016, pada triwulan III mengalami kontraksi sebesar -3,0 persen pada triwulan III. Sedangkan ekspor mengalami kontraksi terus selama tiga triwulan 2016 yakni -3,5 persen pada triwulan I 2016, -2,4 persen pada triwulan II 2016 serta -6,0 persen pada triwulan III 2016. Demikian pula impor mengalami kontraksi yakni -5,0 persen pada triwulan I 2016, -2,9 persen pada triwulan II 2016 serta -3,9 persen pada triwulan III 2016.

Dari sisi produksi, selama triwulan I-III 2016, sektor jasa keuangan dan asuransi yang mencapai 10,5 persen dan sektor informasi dan komunikasi mempunyai laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni mencapai 9,0 persen. Sektor industri pengolahan tumbuh stabil 4,6 persen selama tiga triwulan tersebut yang didukung oleh peningkatan investasi dan insentif dari paket kebijakan yang diluncurkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi selama enam triwulan, mulai triwulan III 2016 mengalami pertumbuhan positif yang didukung oleh peningkatan produksi migas. Bila hal ini berjalan seperti ini, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada Tahun 2018 yakni 6,1 persen bukan tidak mungkin dapat dicapai.

Namun, secara regional, walaupun laju pertumbuhan ekonomi Jawa hanya 5,6 persen selama triwulan III 2016, lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Maluku dan Papua yang mencapai 13,7 persen, namun kontribusi Jawa dalam perekonomian nasional mencapai 58,4 persen yang bertumpu pada kegiatan sektor manufaktur, perdagangan dan konstruksi. Selanjutnya, walaupun laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatra hanya mencapai 3,9 persen pada triwulan III 2016, namun kontribusi Sumatra dalam perekonomian nasional mencapai 22 persen atau menempati urutan kedua proporsinya dalam perekonomian nasional. Kontribusi Pulau Sumatra ini didukung oleh sub sektor perkebunan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri manufaktur. Pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan pada triwulan III 2016 hanya mencapai 2,1 persen, tetapi kontribusi Pulau Kalimantan dalam perekonomian Indonesia mencapai 7,7 persen. Hal ini didukung oleh sektor pertambangan dan penggalian, industri manufaktur dan perkebunan. Laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi mencapai 6,7 persen, tetapi kontribusi Pulau Sulawesi dalam perekonomian nasional mencapai hanya 6,2 persen. Hal ini didorong oleh sektor konstruksi, sub sektor perkebunan dan perdagangan. Laju pertumbuhan ekonomi Pulau Bali dan Nusa Tenggara mencapai 5,0 persen, namun kontribusinya dalam perekonomian nasional hanya mencapai 3,2 persen yang disumbangkan oleh sektor akomodasi, makan dan minuman, sub sektor perkebunan dan sektor perdagangan. Walaupun pertumbuhan ekonomi Maluku dan Papua tertinggi di Indonesia, namun kontribusinya dalam perekonomian nasional hanya mencapai 2,1 persen.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,1 persen pada Tahun 2018, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersinergi pada beberapa hal yang perlu dilakukan yakni melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan, membangun kembali industri berbasis pertanian yang selama ini nyaris ditinggalkan, yang berujung pada memacu perekonomian berbasis pada pertumbuhan langsung. Selama ini daerah belum diberi peran besar dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi. Peran besar tersebut terletak pada usaha regional dalam memberikan kontribusi daerah pada perekonomian nasional. Peran daerah terletak pada keselarasan antara perencanaan pembangunan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sayangnya, bagi Provinsi Sulawesi Tengah belum dapat berbuat apa-apa bagi peningkatan kontribusi ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah terhadap perekonomian nasional karena kontribusinya masih sangat kecil yakni hanya 0,95 persen pertahun berbanding terbalik tingginya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah.

Marginalisasi Pertanian menjadi topik kedua pada tingkat nasional. Secara regional, pembangunan di Indonesia bias ke Jawa. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi Jawa hanya 5,6 persen selama triwulan III 2016, lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Maluku dan Papua yang mencapai 13,7 persen, namun kontribusi Jawa dalam perekonomian nasional mencapai 58,4 persen yang bertumpu pada kegiatan sektor manufaktur, perdagangan dan konstruksi. Artinya, sektor pertanian tidak lagi menjadi penyumbang perekonomian di Jawa. Sebaliknya, sektor pertanian menjadi andalan setiap pulau non Jawa. Selanjutnya, walaupun laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatra hanya mencapai 3,9 persen pada triwulan III 2016, namun kontribusi Sumatra dalam perekonomian nasional mencapai 22 persen atau menempati urutan kedua proporsinya dalam perekonomian nasional. Kontribusi Pulau Sumatra ini didukung oleh sub sektor perkebunan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri manufaktur. Pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan pada triwulan III 2016 hanya mencapai 2,1 persen, tetapi kontribusi Pulau Kalimantan dalam ekonomi Indonesia mencapai 7,7 persen. Hal ini didukung oleh sektor pertambangan dan penggalian, industri manufaktur dan sub sektor perkebunan. Laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi mencapai 6,7 persen, tetapi kontribusi Pulau Sulawesi dalam perekonomian nasional mencapai hanya 6,2 persen. Hal ini didorong oleh sektor konstruksi, sub sektor perkebunan dan perdagangan. Laju pertumbuhan ekonomi Pulau Bali

dan Nusa Tenggara mencapai 5,0 persen, namun kontribusinya dalam perekonomian nasional hanya mencapai 3,2 persen yang disumbangkan oleh sektor akomodasi, makan dan minuman, sub sektor perkebunan dan sektor perdagangan. Walaupun pertumbuhan ekonomi Maluku dan Papua tertinggi di Indonesia, namun kontribusinya dalam perekonomian nasional hanya mencapai 2,1 persen. Sesuai telaah data di atas, ternyata, selain sektor pertambangan dan penggalian, sub sektor perkebunan juga menjadi pendorong utama perekonomian Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Bali.

Secara relatif, kegagalan pembangunan Indonesia selama ini karena mengabaikan pertanian. Pertanian menjadi ruh pembangunan pada negara-negara *Asian emerging market* seperti Taiwan, Philipina, Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Di Indonesia, hampir semua daerah berbasis pada pertanian. Namun, dari sisi produksi, petani menghadapi kendala kepemilikan lahan. Saat ini di daerah, kepemilikan lahan pertanian telah berkurang dari 0,5 ha menjadi 0,25 Ha. Hal ini terjadi karena kebutuhan sosial ekonomi seperti mengawinkan anak, acara-acara kematian, desakan pihak luar memaksa petani menjual aset mereka. Dari sisi ini pula, kalender tanam petani kurang pasti sebagai konsekuensi anomali cuaca. Ketiga, petani tergantung pada pasokan sarana produksi pertanian seperti bibit, pupuk dari pengijon. Akibatnya dari sisi kelembagaan ekonomi, mereka berada pada posisi daya tawar lemah.

Kedua, dari sisi konsumsi, bila merujuk pada data *Food Security Vulnerability Atlas (FSVA)* publikasi BPS, maka ditemukan berbagai desa masuk kategori rawan pangan baik dari sisi akses maupun ketersediaan pangan. Tidak jarang desa-desa tersebut merupakan desa lumbung pangan. Hal ini terjadi karena jerat rentenir telah membelenggu petani padi dan hortikultura sehingga ada kewajiban mereka menjual kepada pelepas uang. Ketergantungan pada monokultur beras membuat daerah menjadi rawan pangan. Diversifikasi tanaman pangan seperti jagung, sagu, ketela pohon, ubi jalar dapat menjadi pilihan utama.

Ketiga, dari sisi, pasar, tidak jarang petani memperoleh asimetri informasi. Di daerah ekowisata Kepulauan Togian Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, harga cengkih yang diterima petani mencapai Rp.120 ribu per kilogram. Oleh karena perubahan informasi pasar, sesampai di Gorontalo, harga cengkih yang dibawa petani melalui Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) mengalami penurunan drastis menjadi Rp78.000,-. Di Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong, petani semangka saat panen mempunyai mata rantai pasar pada pembeli di Kalimantan Timur. Harga di daerah asal mencapai Rp3000,- lalu di Kalimantan Timur mencapai Rp15.000,- per buah. Tanpa diketahui oleh petani semangka di Kecamatan Tomini, petani di Kaltim dapat berhasil melakukan budidaya semangka dan waktu panen bersamaan antara petani kedua wilayah. Oleh karena asimetri informasi, petani semangka di Tomini merugi karena harganya di Kaltim tinggal Rp3000,- sama dengan harga di daerah asal. Dari sisi kelembagaan, Perangkat Daerah (PD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota belum berperan optimal dalam memasok informasi harga pangan. Akibatnya petani kesulitan saat musim panen tiba.

Keempat, untuk mengurangi ketergantungan petani pada benih dan pupuk, sebaiknya Pemerintah Pusat memfasilitasi pengadaan benih dan pupuk hasil produksi domestik. Selama ini mekanisme yang terjadi sama saja petani Indonesia mensubsidi produsen benih dan pupuk asing yang memang sudah sangat kaya. Untuk maksud ini, 519 kabupaten/kota di Indonesia harus selalu memuktahirkan data luas lahan pertanian, luas lahan peruntukkan, kepemilikan lahan pertanian. Data ini berguna bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melindungi petani melalui pemberian asuransi lahan tanaman pangan dan perkebunan yang preminya Rp180 ribu per hektar pertahun. Dari Rp180 ribu tersebut, Rp150 ribu disubsidi oleh Pemerintah Pusat, sisanya dapat menjadi co-sharing Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Melalui Asuransi PT. Jasa Indonesia, bila terjadi gagal panen atau fuso, maka petani akan rugi sebesar Rp6 juta per Ha. Pemerintah Daerah dapat juga memberikan

fasilitas asuransi jiwa bagi Petani, pekebun, nelayan per Kepala Keluarga. Selain itu, selama masa mereka bekerja, Pemerintah Daerah seperti pengalaman Kota Palu dapat membayarkan premi perbulan sebesar Rp10.250,- kepada Badan Penyelenggara Jasa Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) sebagai jaminan kematian. Bila dalam masa bekerja mereka wafat, maka BPJS-TK dapat memberikan pada keluarga ini sebesar Rp81,5 juta, namun bila mereka wafat di luar jam kerja yang disepakati, maka BPJS-TK akan memberikan uang duka sebagai jaminan kematian sebesar Rp21 juta. Jaminan seperti akan memberikan rasa aman kepada petani, pekebun dan nelayan sehingga akan meningkatkan produktivitas mereka dalam bertani, berkebun dan melaut. Konsekuensinya, para kepala keluarga ini tidak akan mewariskan kondisi kemiskinan pada keluarganya karena memperoleh jaminan dari Pemerintah yang dapat dipergunakan sebagai modal usaha yang secara kumulatif dari meningkatkan produktivitas petani sehingga menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kembali ke pertanian merupakan syarat mutlak bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi karena bila pangan terpenuhi, cadangan devisa Indonesia yang dipergunakan untuk mengimpor bahan pangan semakin berkurang dan hal ini akan memacu pembangunan ekonomi desa di mana 70 persen penduduk kita berdomisili dan bermatapencaharian sebagai petani, pekebun dan nelayan. Payung regulasi yang melarang alih fungsi lahan produktif pertanian masal, keberpihakan kebijakan pertanian tidak saja pada sisi produksi, tetapi pada sisi konsumsi, dan pasar dapat menunjang pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa menguras devisa negara bagi impor kebutuhan pangan Indonesia yang sebenarnya dapat dihasilkan oleh Indonesia yang memiliki lahan produktif dan luas.

Ketergantungan Fiskal Daerah Luar Jawa menjadi isu ketiga secara nasional. Rolf Aaberg (2015), ahli Matematika Universitas Oslo menyatakan ada tiga pertumbuhan ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi alamiah, pertumbuhan ekonomi langsung, serta pertumbuhan multiplier.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini di berbagai daerah penghasil tambang di Indonesia hanyalah pertumbuhan alamiah dengan menggunakan pendekatan wilayah. Ukurannya adalah PDRB yang menghitung nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. Pendekatan ini bias sangat besar dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, karena mahal biaya hidup di wilayah pertambangan tersebut menggerus pendapatan masyarakat, *high tech industries* pertambangan serta sifat pertambangan *myopic* yakni tambang mengubah pola pikir petani pasca pertambangan tidak lagi kembali bertani. Kedua, pertumbuhan ekonomi tinggi ini bukan merupakan pertumbuhan ekonomi langsung (*direct growth*) yakni bukan pertumbuhan yang terjadi akibat belanja Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini beralasan karena belanja APBD beberapa kabupaten/kota/provinsi di Indonesia rata-rata di atas 70 persen habis diperuntukkan bagi belanja aparatur. Jadi yang merasakan langsung atas belanja Pemerintah ini adalah pegawai negeri sipil (PNS) melalui belanja gaji, lauk pauk maupun perjalanan dinas. Artinya yang terjadi *trickle up effect*. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dicapai selama ini belum menimbulkan ‘dampak serampang’ atau *multiplier effect* sebagai akibatnya minimnya belanja pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang tercermin dari fenomena *trickle up effect* karena belanja modal pun masih dapat dikonversi menjadi belanja aparatur atas nama belanja barang atau belanja modal.

Namun, secara regional, walaupun laju pertumbuhan ekonomi Jawa hanya 5,6 persen selama triwulan III 2016, lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Maluku dan Papua yang mencapai 13,7 persen, namun kontribusi Jawa dalam perekonomian nasional mencapai 58,4 persen yang bertumpu pada kegiatan sektor manufaktur, perdagangan dan konstruksi. Selanjutnya, walaupun laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatra hanya mencapai 3,9 persen pada triwulan III 2016, namun kontribusi Sumatra dalam perekonomian nasional mencapai 22 persen atau menempati urutan kedua proporsinya dalam perekonomian

nasional. Kontribusi Pulau Sumatra ini didukung oleh sub sektor perkebunan, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri manufaktur. Pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan pada Triwulan III 2016 hanya mencapai 2,1 persen, tetapi kontribusi Pulau Kalimantan dalam perekonomian Indonesia mencapai 7,7 persen. Hal ini didukung oleh sektor pertambangan dan penggalian, industri manufaktur dan perkebunan. Laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi mencapai 6,7 persen, tetapi kontribusi Pulau Sulawesi dalam perekonomian nasional mencapai hanya 6,2 persen. Hal ini didorong oleh sektor konstruksi, sub sektor perkebunan dan perdagangan. Laju pertumbuhan ekonomi Pulau Bali dan Nusa Tenggara mencapai 5,0 persen, namun kontribusinya dalam perekonomian nasional hanya mencapai 3,2 persen yang disumbangkan oleh sektor akomodasi, makan dan minuman, sub sektor perkebunan dan sektor perdagangan. Walaupun pertumbuhan ekonomi Maluku dan Papua tertinggi di Indonesia, namun kontribusinya dalam perekonomian nasional hanya mencapai 2,1 persen.

Selama periode 2014-2016, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Pulau Jawa mencapai Rp1.143,2 trilyun yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mencapai Rp884,9 trilyun, cukai dan bea masuk mencapai Rp161,6 trilyun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp96,6 trilyun. Sebaliknya, pengeluaran Pulau Jawa hanya mencapai Rp.302,8 trilyun. Hal ini berarti ada surplus Rp840,4 trilyun yang diperuntukkan membiayai lima pulau lain yang semuanya mengalami defisit anggaran pembangunan. Di Pulau Sumatra, PAD mencapai Rp141,1 trilyun yang terdiri dari PDRD mencapai Rp66,9 trilyun, Cukai dan bea Masuk Rp6,8 trilyun, PNBP mencapai Rp70,4 trilyun. Sebaliknya, pengeluaran mencapai Rp232,3 trilyun meliputi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp176,1 dan Belanja Kementrian/Lembaga (K/L) mencapai Rp56,2 trilyun. PAD Pulau Sumatra mencapai Rp86 trilyun terdiri dari PDRD Rp32 trilyun, Cukai dan Bea Masuk Rp1,1 trilyun, serta PNBP mencapai Rp52,9 trilyun. Sebaliknya, pengeluaran mencapai Rp93,9 trilyun. Konsekuensinya,

Pulau Kalimantan mengalami defisit sebesar Rp7,9 trilyun. PAD Pulau Sulawesi mencapai Rp19,7 trilyun. Pengeluaran baik TKDD maupun belanja K/L di Pulau Sulawesi mencapai Rp104,5 trilyun, sehingga Pulau Sulawesi mengalami defisit anggaran mencapai Rp84,8 trilyun. PAD dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp15,5 trilyun. Sebaliknya, pengeluaran Pulau Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp55,64 trilyun, sehingga defisit anggaran bagi pembangunan di Pulau Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp40,9 trilyun. PAD yang dipungut dari Pulau Maluku dan Papua mencapai Rp18,4 trilyun sedangkan pengeluaran pembangunan di Maluku dan Papua mencapai Rp89,6 trilyun. Konsekuensinya, defisit anggaran di kedua pulau tersebut mencapai Rp71,3 trilyun. Singkatnya, satu pulau di Indonesia mensubsidi lima pulau dalam pembiayaan pembangunan.

Hutang Luar Negeri Bagi Pembiayaan Pembangunan Daerah menjadi isu keempat. Berdasarkan sejarah, Hutang Luar Negeri (HLN) di Indonesia sudah dilakukan sejak Orde Lama. Pada awalnya penggunaan HLN hanya sebagai dana pendamping untuk menutup kekurangan dana pembangunan yang belum dapat dipenuhi dari sumber dana domestik. Namun dalam perkembangannya HLN telah mengarah menjadi sumber dana utama ketika terjadi defisit fiskal. Sehubungan dengan keadaan tersebut, jumlah HLN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan pada masa krisis Asia lalu menurun pada dekade saat ini. Adanya pembiayaan defisit anggaran menentukan tingkat suku bunga domestik dan inflasi yang pada gilirannya mempengaruhi ekspektasi nilai tukar dan kapasitas perekonomian untuk memperoleh devisa.

Pada awalnya HLN dimaksudkan sebagai sumber pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi namun perkembangan sosial politik membelokkan fungsi pelengkap dari HLN menjadi beban bagi perekonomian. Kebijakan di sektor publik langsung mempengaruhi kondisi HLN suatu negara, terutama menyangkut beban pembayaran cicilan dan bunga hutang. Beban pemerintah semakin berat apabila tingkat kepercayaan terhadap negara tersebut menurun dan hal ini

menimbulkan masalah pinjaman luar negeri. Terkadang pemerintah terpaksa mengambil alih hutang swasta demi menjaga kredibilitas di mata internasional.

Menurut sumbernya, pinjaman terdiri dari Hutang Dalam Negeri (HDN) dan HLN. Perhatian pada HLN lebih serius ketimbang HDN karena kemampuan pembayaran HLN dipengaruhi oleh kemampuan memperoleh devisa dan akan mempengaruhi kesejahteraan nasional. Pandangan demikian membawa kekeliruan pada negara-negara berkembang terutama di belahan Amerika Latin pada dekade 1970an yang berimplikasi munculnya krisis HLN pada Tahun 1982.

Akumulasi utang luar negeri (*external debt*) merupakan suatu gejala umum yang wajar. Rendahnya tabungan dalam negeri tidak memungkinkan dilakukannya investasi secara memadai, sehingga pemerintah negara-negara berkembang harus menarik dana pinjaman dan investasi dari luar negeri. Bantuan luar negeri dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha negara yang bersangkutan guna mengurangi kendala utamanya yang berupa kekurangan devisa, serta untuk mempertinggi tingkat pertumbuhan ekonominya.

Pembiayaan ditentukan oleh kebutuhan pemerintah, jika pembiayaan utang yang digunakan untuk investasi, maka berpengaruh lebih besar terhadap perekonomian, daripada digunakan untuk membiayai konsumsi pemerintah dan menutupi cicilan pokok pinjaman serta bunga pinjaman. Ketika kondisi ini terus berlanjut, maka kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya defisit anggaran pada masa yang akan datang dengan pembayaran utang ataupun pengeluaran belanja pemerintah yang lain, sehingga pemanfaatan pembiayaan tidak lagi meningkatkan investasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Antara Tahun 1965 sampai 1997 perekonomian Indonesia tumbuh dengan persentase rata-rata per tahunnya hampir di atas 7 persen. Pencapaian ini memungkinkan perekonomian Indonesia bertumbuh dari peringkat negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan

menengah ke bawah. Kendati begitu, krisis finansial Asia yang meletus pada akhir tahun 1990-an mengakibatkan dampak sangat negatif untuk perekonomian Indonesia, menyebabkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 13,6 persen pada Tahun 1998 dan pertumbuhan yang terbatas pada 0,3 persen di 1999, selanjutnya antara Tahun 2000-2004, pemulihan ekonomi terjadi dengan rata-rata pertumbuhan PDB pada 4,6 persen per tahun. Setelah itu, pertumbuhan PDB berakselerasi (dengan pengecualian pada Tahun 2009 waktu, akibat guncangan dan ketidakjelasan finansial global, pertumbuhan PDB Indonesia jatuh menjadi 4,6 persen, sebuah angka yang masih mengagumkan yang termasuk tertinggi ketiga setelah Tiongkok dan India) dan memuncak pada 6,5 persen di 2011. Kendati begitu, setelah 2011 ekspansi perekonomian Indonesia mulai sangat melambat. Di antara Tahun 2011-2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dengan cukup tajam yang terus menurun persentase tiap tahunnya.

Berdasarkan kelompok peminjam, posisi utang luar negeri Indonesia sebagian besar terdiri dari utang luar negeri swasta. Pada Tahun 2005 memang utang luar negeri sektor pemerintah dan Bank Indonesia lebih besar dari utang luar negeri sektor swasta yaitu sebesar 80,8 miliar dolar AS (59,6 persen dari total utang luar negeri), sementara utang luar negeri swasta berada pada jumlah 54,3 miliar dolar AS (40,4 persen dari total utang luar negeri). Seiring dari tahun ke tahun jumlah utang luar negeri swasta Indonesia terus meningkat, sehingga pada tahun 2014 utang luar negeri swasta di Indonesia mencapai 163,6 miliar dolar AS (55,7 persen dari total utang luar negeri) sedangkan utang luar negeri pemerintah dan Bank Indonesia sebesar 129,7 miliar dolar AS (44,3 persen dari total utang luar negeri).

Berdasarkan jangka waktu, posisi ULN Indonesia pada Tahun 2015 meningkat akibat meningkatnya ULN jangka panjang, baik di sektor publik maupun swasta. Sementara itu, ULN jangka pendek di sektor publik maupun swasta mengalami penurunan di tengah perlambatan kegiatan ekonomi domestik. Struktur posisi ULN tersebut menunjukkan

perkembangan yang sehat sebagaimana tercermin dari dominasi posisi ULN jangka panjang dibandingkan dengan posisi ULN jangka pendek baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Posisi ULN tersebut meningkat dari 293,4 miliar dolar AS pada Tahun 2014 menjadi 310,7 miliar dolar AS. Sejalan dengan peningkatan posisi ULN yang disertai dengan perlambatan pertumbuhan PDB, rasio posisi ULN terhadap PDB pada 2015 meningkat dari 33 persen pada 2014 menjadi 36,1 persen. Rasio tersebut masih relatif aman dan berada dalam kisaran negara *peer group*. Selain itu, seiring dengan melambatnya perekonomian Indonesia, pertumbuhan ULN Indonesia pada 2015 melambat dari 10,4 persen pada tahun sebelumnya menjadi 5,8 persen.

ULN Indonesia pada akhir triwulan I 2017 berada pada posisi 326,3 miliar dolar AS, tumbuh terkendali sebesar 2,9 persen (yoy) atau sedikit meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 2,0 persen (yoy). Berdasarkan kelompok peminjam, peningkatan ULN tersebut dipengaruhi oleh lebih kecilnya kontraksi pertumbuhan ULN swasta pada triwulan I 2017 yaitu sebesar -3,6 persen (yoy) dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar -5,5 persen (yoy). Sementara itu, ULN sektor publik tumbuh melambat dari 11,0 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 10,0 persen (yoy). Pada akhir triwulan I 2017, posisi ULN sektor publik tercatat sebesar 166,5 miliar dolar AS (51,0 persen dari total ULN). Sebaliknya, posisi ULN sektor swasta tercatat sebesar 159,9 miliar dolar AS (49,0 persen dari total ULN). Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN Indonesia terhadap PDB pada akhir triwulan I 2017 tercatat relatif stabil di kisaran 34 persen sebagaimana pada akhir triwulan IV 2016, namun menurun jika dibandingkan dengan triwulan I 2016 yang sebesar 37 persen.

Dampak nyata dari beban hutang itu pada anggaran pembangunan Indonesia sebesar 40 persen dari total pengeluaran dan lebih 5 Persen PDB Indonesia setelah krisis, pengeluaran pembangunan terpotong menjadi hampir sepertiganya sekali krisis pada tahun 1997. pada tahun 2001 pembayaran bunga atas hutang domestik dan luar negeri Indonesia

diperkirakan sekitar 35 Persen dari pengeluaran Pemerintah Pusat. Sebagai perbandingan pengeluaran pembangunan yang sangat dibutuhkan hanya sekitar 17,5 persen dari pengeluaran dalam negeri Pemerintah.

Mengenai hutang dalam negeri pemerintah harus membayar kewajibannya (bunga dan pokok) untuk obligasi yang dikeluarkannya sejak 1997, kewajiban finansial akan dimulai pada tahun 2001 sampai 2018. Dari Tahun 2000-2005, beban pembayaran cicilan dan bunga akan menjadi secara berturut-turut Rp15,74 Triliun (2001), Rp19,67 Triliun (2002), Rp14,93 Triliun (2003), Rp61,23 Triliun (2005) sementara pada tahun 2006 – 2018 jumlahnya akan menjadi; Rp67,85 Triliun (2006), Rp73,98 Triliun (2007), Rp66,45 Triliun (2008), Rp69,52 Triliun (2009), Rp80 Triliun (2017), dan Rp138 Triliun (2013).

Selama periode 2014-2017, pembiayaan hutang neto meningkat sejalan dengan kebijakan ekspansif Pemerintahan Jokowi-JK dalam pembangunan dengan menekankan pada prioritas utama pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sejak Tahun 2015. Pembiayaan Hutang Neto meningkat dari Rp353,4 trilyun di Tahun 2014 menjadi Rp416,1 trilyun di Tahun 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 5,6 persen. Sedangkan pembiayaan infrastruktur meningkat dari Rp154,7,- trilyun di Tahun 2014 menjadi Rp387,7 trilyun di Tahun 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 35,83 persen suatu peningkatan sangat besar selama tiga tahun. Sementara pembiayaan pendidikan meningkat sebesar 54,79 persen yakni dari Rp31,9 trilyun pada Tahun 2014 menjadi Rp118,3,- trilyun pada Tahun 2017. Selanjutnya, pembiayaan kesehatan meningkat dari Rp59,7 trilyun pada Tahun 2014 menjadi Rp.104,1 trilyun pada Tahun 2017 atau terjadi peningkatan sebesar 20,36 persen. Sedangkan alokasi anggaran bagi perlindungan sosial meningkat dari Rp13,1 trilyun pada Tahun 2014 menjadi Rp157,7 trilyun pada Tahun 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 129,19 persen.

Selama periode 2015-2017, beberapa capaian output prioritas sektor infrastruktur terjadi pada rekonstruksi, pelebaran, pembangunan jalan kecuali jalan tol. Panjang jalan bertambah dari realisasi pada Tahun 2015 sepanjang 5.229 km bertambah 2.528 km pada Tahun 2016, diperkirakan pada Tahun 2017 bertambah lagi 2.571 km. Bandara yang selesai dibangun pada Tahun 2016 mencapai 3 unit, diperkirakan pada Tahun 2017, 6 bandara akan selesai dibangun. Selanjutnya, bendungan yang telah terealisasi pada Tahun 2015 dan 2016 masing-masing 29 unit dan 37 unit. Pemerintah akan menyelesaikan pada Tahun 2017 sebanyak 39 unit bendungan. Pemerintah membangun juga jalur kereta api baru. Pada Tahun 2015, Pemerintah telah menyelesaikan 85 km dan pada Tahun 2016 Pemerintah telah menambah 114,6 km rel kereta api di luar rel *Long Rapid Transportation* (LRT) di Sumatra Selatan dan Jabodetabek. Pada Tahun 2017 ini Pemerintah tengah menyelesaikan 175 km rel. Di bidang perumahan, pada Tahun 2015 Pemerintah telah merealisasikan 99,2 ribu unit pembangunan rumah, 111,2 ribu unit di Tahun 2016, serta akan menyelesaikan pembangunan rusun, rumah khusus, serta peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 123,4 unit pada Tahun 2017 ini.

Capaian output prioritas pada sektor pendidikan selama periode 2015-2016 mencakup Kartu Indonesia Pintar mencapai 20,5 juta siswa pada Tahun 2015 dan 20,7 juta siswa pada Tahun 2016, beasiswa bidikmisi masing-masing sebanyak 274,5 ribu siswa dan 324 ribu siswa. Pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi gedung sekolah masing-masing mencapai 21,6 ribu unit pada 2015 dan 28,4 ribu unit pada 2016. Selain itu, Biaya Operasional Sekolah (BOS) masing-masing mencapai 7,9 juta siswa dan 8 juta siswa. Belanja pendidikan yang berasal dari sumber HLN ini bertujuan meningkatkan akses, distribusi dan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri. Alokasi anggaran pendidikan dijaga tetap stabil pada angka 20 persen sesuai amanah Undang-Undang. Di sektor kesehatan, selama periode 2015-2016, realisasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) masing-masing mencapai 86,4 juta jiwa dan 91,1 juta atau

mengalami kenaikan sebesar 5,44 persen. Selanjutnya, pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap Anak Usia 0-11 bulan masing-masing mencapai 3,4 juta bayi dan 4 juta bayi. Prevalensi *stunting* (kategori pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bayi usia dua tahun) masing-masing mencapai 29 persen dan 27,5 persen. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas masing-masing mencapai 77 persen dan 81,5 persen. Alokasi anggaran kesehatan dijaga sebesar 5 persen terhadap APBN untuk meningkatkan *supply side* dan layanan serta menjaga keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Capaian output prioritas di sektor perlindungan sosial selama periode 2012-2017 yakni program yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Program-program tersebut mencakup CCT/PKH yang meningkat anggarannya dari Rp1,83 triliun menjadi Rp11,34 triliun, Jamkes/KIS naik dari Rp5,62 triliun menjadi Rp25,50,- triliun, Bantuan Siswa Miskin (BSM) meningkat dari Rp4,64,- triliun menjadi Rp14,21 triliun, serta BOS meningkat dari Rp3,96 triliun menjadi Rp8,07 triliun. Selain itu, belanja infrastruktur melalui anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai 10 persen dari total APBN periode 2015-2017.

Dari sisi penciptaan lapangan kerja, selama periode 2013-2016, walaupun pertumbuhan ekonomi menurun dari 5,56 persen pada Tahun 2013 menjadi 5,02 pada Tahun 2016, tetapi lapangan kerja yang tercipta meningkat dari 112,76 juta pada Tahun 2013 menjadi 118,41 juta pada Tahun 2016. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan kerja sebanyak 35 juta lapangan kerja menjadi 72 juta lapangan kerja seperti yang terjadi pada Tahun 2016. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,17 persen di Tahun 2013 menjadi 5,61 persen di Tahun 2016.

Bagi negara-negara Industri yang sebagian besar HLNnya diperoleh melalui obligasi yang dijual di berbagai bursa, hutang bukanlah hal yang tabu. Pada dasarnya seluruh Pemerintah di dunia ini termasuk Indonesia memiliki hutang, hanya kadarnya saja berbeda antar satu negara dengan

negara lain. Hutang tersebut diperlukan bagi pembiayaan pembangunan melalui pembiayaan defisit yang dialami oleh berbagai negara. Hal ini pada akhirnya mirip dengan pembiayaan hutang yang diperoleh dunia usaha untuk memanfaatkan kesempatan investasi baik, dengan catatan hasil invesasi tersebut lebih besar dari biaya termasuk hutangnya.

Bagi kita di daerah, pembiayaan HLN yang diperuntukkan pada pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur hendaknya memberikan kesadaran kritis untuk tidak melakukan inefisiensi belanja yang selama ini terjadi di daerah karena lemahnya pemahaman aspek perencanaan dan penganggaran yang berhulu pada ketidakselarasan perencanaan pembangunan.

4.2.3. Isu Strategis Sulawesi Tengah

Isu-Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tengah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam sinergitas rencana pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Isu-Isu Strategis Provinsi Sulawesi Tengah tersebut diuraikan pada bagian berikut.

1. Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakkan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel masih menghadapi beberapa permasalahan dan diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis. Saat ini, kelembagaan pemerintah daerah baik dari aspek struktur maupun fungsi kelembagaan belum efektif dan efisien sehingga kualitas pelayanan publik belum optimal. Di samping itu, rendahnya citra dan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang didasari filosofi *good governance*. Hal ini akibat penerapan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan belum profesional dan belum memiliki indikator dan pola yang jelas.

Dari sisi hukum masih dirasakan budaya hukum masyarakat masih rendah sebagai akibat dari rendahnya pemahaman, kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat serta kepastian dan keadilan hukum masih rendah dan belum merata. Selain itu, masih dirasakan kurangnya sistem koordinasi dan kerjasama fungsional penegakkan serta penyerasian tugas-tugas antara semua unsur aparatur pemerintah daerah di bidang pembinaan tertib hukum dalam rangka usaha terselenggaranya ketertiban dan kepastian hukum masyarakat.

2. Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi

Kondisi wilayah geografis Sulawesi Tengah yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah-daerah wilayah pedesaan, daerah pedalaman dan terpencil sekaligus sebagian dari penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadai aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antardaerah seperti transportasi, irigasi, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi serta kelistrikan.

Seiring dengan peningkatan arus pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk serta mulai tingginya konsumtif masyarakat, untuk itu pemerintah daerah kabupaten/kota telah membangun beberapa infrastruktur khususnya di bidang transportasi udara. Saat ini Kota Palu telah memiliki Bandar Udara Mutiara SIS Aldjufri Palu yang memiliki landasan pacu 2.250 m sehingga dapat didarati oleh pesawat jenis Boeing 737-900. Di samping itu, beberapa kabupaten telah membangun bandar udara seperti Bandar Udara Amirudin Amir di Banggai, Bandara Kasiguncu di Poso, Bandara Lalos di Toli-Toli, Bandara Pogogul di Buol, dan Bandara Tanjung Api di Tojo Una-una yang masih perlu peningkatan kapasitas dan fasilitas dalam memacu akselerasi pembangunan di bidang transportasi udara di daerah Kabupaten-kabupaten. Sementara di bidang transportasi darat secara fungsional kondisi jalan di Sulawesi Tengah sampai dengan tahun

2015 adalah: jalan nasional sepanjang 2.373,40 Km dengan kondisi mantap 93,83 persen dan tidak mantap 6,17 persen, jalan provinsi dengan panjang 1.619,26 Km dengan kondisi mantap 57,70 persen dan tidak mantap 42,30 persen. Dari data ini kondisi jalan provinsi masih banyak dalam kondisi tidak mantap. Hal ini sebagai akibat dari rendahnya fiskal daerah dalam mendanai program kegiatan infrastruktur.

3. Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Dalam pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan masih belum optimal dalam pelaksanaannya untuk itu upaya pengembangan ekonomi masyarakat perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan daya saing serta untuk pemerataan pembangunan ekonomi antar daerah kabupaten/kota secara berkesinambungan. Saat ini pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional namun pertumbuhan perekonomiannya masih bertumpu pada sektor primer pertanian dan pertambangan tetapi relatif masih belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung, sehingga diharapkan ke depan pertumbuhan ekonomi dapat beralih dan terbagi secara merata pada sektor sekunder lainnya yaitu industri, perdagangan dan jasa. Salah satu alasan rendahnya nilai tambah dari produktivitas perekonomian pada sektor sekunder adalah masih rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan masyarakat pada teknologi tepat guna, serta akses pasar yang sangat minim sehingga dalam pemasaran hasil produksi unggulan keluar daerah belum dapat dioptimalkan.

Hasil pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi selama ini masih belum cukup memadai untuk mengatasi kesenjangan kesejahteraan di berbagai wilayah, walaupun didukung dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, daerah-daerah masih

belum dapat mengoptimalkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu, salah satu antisipasi permasalahan kesenjangan dan mempercepat pembangunan perekonomian daerah yaitu dengan cara mendorong penyebaran industri ke daerah-daerah, dengan melakukan terobosan pengembangan kawasan industri yang berbasis pada kompetensi inti dan produk-produk unggulan di setiap daerah.

Daerah yang telah mencoba melakukan klaster industri adalah Kota Palu yang membangun kawasan industri terpadu dan saat ini telah dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pertimbangan dalam mengembangkan Kawasan Industri Terpadu Palu yang di arahkan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sesuai dengan arah kebijakan industri nasional.

4. Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia

Permasalahan pemanfaatan sumber daya alam hingga saat ini tidak memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam semakin menipis. Penurunan kualitas sumber daya alam ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi hutan yang semakin marak akibat terjadinya pembalakan liar, penambangan liar, rusaknya wilayah laut akibat penangkapan ikan secara ilegal serta meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan perumahan dan ekonomi lainnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat eksploitasi sumber daya hutan dan energi untuk pembangunan serta masih rendahnya pemanfaatan sumber daya perikanan dibanding potensinya.

5. Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya

Dalam menganalisis kualitas mutu modal manusia dapat menggunakan berbagai macam indikator penilaian kualitas sumber daya manusia. Salah satu indikator penilaian yang digunakan adalah dengan melihat dan membandingkan kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap daerah. Di Provinsi Sulawesi Tengah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih tergolong rendah. Ini ditandai dengan masih lebih rendahnya nilai IPM Sulawesi Tengah dibandingkan dengan rata-rata Nasional. Tahun 2015, IPM Sulawesi Tengah sebesar 66,76 poin yang masih dibawah rata-rata nasional 69,55 poin. Ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tengah masih tertinggal dibanding pembangunan manusia provinsi lainnya di Indonesia. Kondisi lainnya adalah jumlah masyarakat miskin masih tinggi dan berada di atas rata-rata nasional. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada tahun 2015 berjumlah 406.340 jiwa atau 14,07 persen dari jumlah penduduk Sulawesi Tengah. Karena itu dibutuhkan prioritas-prioritas dan sasaran dalam melakukan perencanaan pembangunan secara serius dan konsisten di bidang kualitas sumber daya manusia agar dapat sejajar dengan daerah lainnya.

4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Banggai Kepulauan

Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai daerah hasil pemekaran Tahun 1999, perlu membenahi Kelembagaan pemerintahnya. Pembenahan yang mendesak menyangkut koordinasi yang jelas antar Perangkat Daerah berkaitan dengan penanganan masalah. Dari sisi Manajemen Publik, erat kaitannya dengan kualitas pelayanan. Pelayanan Publik sering dilihat sebagai representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena hal itu bersentuhan langsung dengan tuntutan kebutuhan faktual masyarakat terhadap peranan pemerintah. Filosofi pelayanan publik seharusnya menempatkan rakyat sebagai subyek dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Moralitas dari pelayanan publik merupakan derivasi dari filosofi tersebut, yaitu pemberdayaan rakyat dalam relasinya dengan struktur kekuasaan.

Kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas adalah merupakan kebutuhan manusia. Karena pada dasarnya manusia membutuhkan pelayanan berkualitas selama hidupnya. Seiring dengan meningkatnya keinginan manusia untuk hidup lebih layak, maka kualitas pelayanan sangat dibutuhkan.

Peran pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi sangat penting mengingat peran pemerintah/birokrasi menguasai keseluruhan kebutuhan masyarakat. Karena peran dan penguasaan itu, maka pemerintah menjadi pemegang kunci keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik itu sendiri adalah segala kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan orang banyak yakni pendidikan, kesehatan, transportasi dan kebutuhan lainnya di mana masyarakat membutuhkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah secara terus-menerus meningkatkan pelayanan publik. Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warganegara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan pelayanan. Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik adalah bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, namun juga bagaimana pelayanan dapat dilakukan tanpa membedakan status dari masyarakat yang dilayani, atau dengan kata lain bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis.

Satu dari beberapa tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai “pelayan masyarakat” (public servant). Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai daerah hasil pemekaran Tahun 1999, sudah tentu memerlukan sarana dan prasarana layanan publik yang harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Oleh

karena itu, agar pelayanan berkualitas lima indikator pelayanan publik, yaitu *reliability*, yang ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar; *tangibles*, yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; *responsiveness*, yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat; *assurance*, yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan, dan *empathy*, yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.

Manajemen pelayanan publik di Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan karena Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai posisi sebagai daerah yang relatif sulit dijangkau dan jauh dari pusat pemerintahan (Ibukota Provinsi). Posisi ini menyebabkan Kabupaten Banggai Kepulauan harus memiliki model manajemen Publik yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Selanjutnya Kebijakan Publik. Kebijakan publik berkaitan dengan bagaimana tindakan-tindakan pemerintah berkaitan dengan Formulasi, Analisis, Implementasi dan Evaluasi kebijakan baik individu maupun kelompok mampu menyelesaikan masalah publik dan memberi kesejahteraan masyarakat. Masalah kebijakan publik selalu berkaitan dengan lemahnya Formulasi (menetapkan masalah) sebagai faktor penting pada proses penyelesaian masalah.

Kebijakan publik menjadi penting diperhatikan saat ini, mengingat kebijakan publik yang berkaitan dengan tindakan-tindakan individu dan kelompok berkorelasi sangat erat dengan faktor *leadership*. Daerah-daerah pemekaran mempunyai persoalan krusial dengan kebijakan publik dan *leadership*. Contoh, begitu banyak Kepala Daerah tersangkut korupsi berkaitan dengan kebijakannya dan kepemimpinannya. Hampir semua kepala daerah ditangkap sebagai koruptor disebabkan oleh tindakan-tindakan kebijakannya didasari oleh *leadership*nya yang cenderung hanya menguntungkan bagi diri dan keluarganya.

Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai potensi untuk berkembang sebagai daerah dengan basis kepulauan sepanjang daerah

ini mampu membuat suatu model kebijakan publik sesuai dengan karakteristik masalah publiknya. Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya mendasari setiap kebijakan publiknya didahului dengan kemampuan mengformulasi masalah publiknya dengan pendekatan *"search for identification"*

Kedua, Pembangunan Pendidikan Belum Optimal. Hal ini tercermin dari angka Harapan Lama Sekolah (HLS) pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 mencapai masing-masing 12,71 tahun dan 12,72 tahun. Sebagai perbandingan, HLS Kabupaten Banggai dan Banggai Laut pada periode yang sama masing-masing mencapai 12,33 tahun dan 12,73 tahun serta 12,58 tahun dan 12,85 tahun. Hal ini berarti dalam setahun saja, HLS Kabupaten Banggai Kepulauan dilampaui oleh kedua kabupaten tetangga. Sedangkan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banggai Kepulauan pada Tahun 2015 dan 2016 masing-masing mencapai 7,73 tahun dan 7,94 tahun. Hal ini berarti rata-rata penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan mengenyam pendidikan hingga di kelas 1-2 SMP/MTs. Sebagai perbandingan, RLS Kabupaten Banggai berada di bawah Kabupaten Banggai Kepulauan yakni 7,72 tahun dan 7,73 tahun selama periode tersebut. Hal ini berarti RLS penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan berada di atas RLS Kabupaten Banggai. Sebaliknya, RLS Kabupaten Banggai Laut secara relatif hampir sama dengan Kabupaten Banggai Kepulauan yakni 7,82 tahun dan 7,94 tahun.

Ketiga, Derajat Kesehatan Masih Rendah. Hal ini tercermin dari angka Harapan Hidup (HH) penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan yang mencapai 64,35 tahun pada Tahun 2015 dan 64,44 tahun pada Tahun 2016. Angka ini berada di atas empat kabupaten lainnya yakni Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai Laut. Sebaliknya, angka Harapan Hidup (HH) Kabupaten Banggai Laut berada jauh di bawah angka Harapan Hidup (HH) Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Sigi.

Keempat, Infrastruktur Belum Memadai. Hal ini ditandai oleh belum memadainya transportasi darat antar kecamatan yang menggunakan roda dua dan *truck* menggunakan tarpal sebagai atap. Kondisi jalan dan jembatan antar kecamatan baik kualitas dan kuantitas juga masih belum memadai sehingga membutuhkan intervensi terutama dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat meningkatkan status jalan antar kecamatan di Pulau Peling menjadi jalan Provinsi. Transportasi Laut dilayani oleh armada reguler pelayanan milik swasta maupun PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) yang melayani Tataba-Luwuk PP, Salakan-Luwuk PP, Bolonan-Luwuk, dan lain-lain.

Kelima, baik angka absolut maupun persentase Kemiskinan masih satu dari empat kabupaten yang tertinggi di Sulawesi Tengah. Selama periode 2015-2016, penduduk miskin di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami kenaikan dari 18,57 ribu jiwa pada Tahun 2015 menjadi 18,72 ribu jiwa pada Tahun 2016 atau mengalami kenaikan dari 16,08 persen menjadi 18,18 persen. Dari segi jumlah, angka kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan angka kemiskinan tertinggi kesembilan setelah Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Morowali Utara. Dari sisi persentase, angka kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan angka kemiskinan tertinggi kedelapan setelah Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Buol.

Keenam, Degradasi Lingkungan Masih Berlangsung. Eksploitasi massal sumberdaya alam melalui *illegal logging*, *illegal mining*, *illegal fishing* melalui cara 'tebang rata', penggunaan bahan kimia berbahaya, penggunaan bom maupun pembiusan ikan masih merupakan ancaman pada keberlanjutan lingkungan hidup. Di Kabupaten Banggai Kepulauan, fenomena ini terjadi karena eksploitasi sumberdaya alam ini berlangsung

di daerah pesisir menimbulkan masalah banjir, longsor, degradasi lahan kritis, abrasi pantai, pendangkalan sungai dan pantai. Adanya bom ikan dapat menghancurkan biota laut terutama terumbu karang di sepanjang pesisir Kecamatan Buko, Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Bulagi yang sering dilalui pelayaran bila musim gelombang tinggi di Tanjung Pamali maupun di sepanjang Selat Mansamat (Kalumbatan) wilayah Kecamatan Totikum, Kecamatan Peling Tengah dan Kecamatan Liang.

Ketujuh, Iklim Investasi dan Penanaman Modal Belum Kondusif. Perbaikan terhadap kondisi ini menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banggai Kepulauan. Sarana dan prasarana dalam menunjang investasi di daerah masih belum memadai. Adanya regulasi dan kepastian waktu bagi para pelaku bisnis untuk memanfaatkan peluang usaha sesuai dengan potensi dan prospektif sumberdaya alam yang tersedia di Kabupaten Banggai Kepulauan di sub sektor perikanan dan kelautan.

Kedelapan, Kunjungan Pariwisata Masih Belum Optimal. Kabupaten Banggai Kepulauan menghadapi berbagai permasalahan seperti Pelayanan industri pariwisata masih relatif rendah, sadar wisata masyarakat masih relatif kurang, sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih terbatas, masih lemahnya konsep pembangunan wisata berwawasan ekologi dan inovatif di lingkungan pariwisata, desain Kampanye wisata masih belum optimal, peran aktif masyarakat lokal dalam pengembangan wisata masih kurang, dan yang tidak kalah penting informasi pariwisata yang belum dikenal secara terbuka baik melalui *website* resmi milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan maupun publikasi reguler seperti peta wisata, buku perjalanan wisata, publikasi singkat informasi pariwisata yang dapat diakses secara gratis di bandara Syukuran Amir Luwuk, Pelabuhan Luwuk, Pelabuhan Salakan, Pelabuhan Rakyat di Bolonan, Tataba, Tobing.

Kesembilan, Produksi Perikanan Belum Optimal. Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dimanfaatkan sebatas usaha penangkapan bagi kebutuhan rumah tangga nelayan, sedangkan usaha budidaya belum

teroptimalkan. Limbah perikanan belum dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena belum mengenal mekanisme pengolahannya. Belum jelasnya kawasan budidaya serta zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kualitas produk perikanan yang dihasilkan baik oleh nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan masih di bawah standar mutu yang dipersyaratkan. Sentuhan teknologi pada pengolahan sumberdaya kelautan dan perikanan masih sederhana. Aktivitas *illegal fishing* yang mengakibatkan kerusakan ekosistem terumbu karang dan *mangrove* dan berdampak pada produksi hasil tangkapan nelayan masih ditemukan di wilayah kepulauan terutama wilayah yang jauh dari jangkauan pengawasan yang berhadapan langsung dengan wilayah Kabupaten Banggai laut seperti di pesisir Kecamatan Liang, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Bulagi yang berbatasan Pulau Bangkurung dan Labobo.

Tabel 4.3
Identifikasi Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Provinsi Sulawesi Tengah	Dinamika Kabupaten Banggai Kepulauan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinamika perekonomian global	Kinerja Perekonomian Nasional dan Daerah	Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum Dan Ham.	Reformasi Birokrasi Belum optimal.
2	Perubahan iklim global	Marginalisasi Pertanian	Pengelolaan, Sumber Daya Agribisnis dan Maritim	Pembangunan bidang pendidikan Belum optimal.
3	Krisis Pangan Menglobal	Ketergantungan Fiskal Tinggi Daerah Luar Jawa	Divergensi Kemiskinan	Derajat Kesehatan Rendah.
4	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	Hutang Luar Negeri bagi Pembiayaan Pembangunan	Inefisiensi APBN	Infrastruktur Daerah masih belum memadai.
5			Pembangunan Infrastruktur Daerah Dan Mendukung Kemandirian Energi.	Baik angka absolut maupun persentase Kemiskinan masih satu dari kabupaten tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah.
6			Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.	Berlangsungnya degradasi lingkungan.
7			Kualitas Sumberdaya	Iklim investasi dan penanaman modal belum kondusif.

No	Isu Strategis			
			Manusia Yang Berdaya Saing belum optimal	
8				Pengelolaan industri pariwisata belum optimal, sehingga berdampak pada rendahnya kunjungan pariwisata.
9.				Rendahnya produksi dan pengolahan perikanan laut dan darat.

Sumber: Diolah dari hasil kajian berbagai data internasional; RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021; dan Hasil diskusi kelompok terarah pada tanggal 16-20 Oktober 2017, di Kabupaten Banggai Kepulauan.